

DAFTAR RUJUKAN

Buku

- Abdullah K. 2018. Berbagai Metodologi dalam Penelitian Pendidikan dan Manajemen. Gowa:Gunadrama Ilmu.
- Adiwinata, S. 2022. Penuntut Hukum Agraria. Bandung: Widya Pratama Offset.
- Ali, Achmad. 2014. Hukum Agraria Indonesia (Pertanahan Indonesia). Jakarta: Prestasi Pusakakarya
- Ali, Achmad dan Heryani Wiwie. 2014. Kajian Empiris terhadap Hukum. Jakarta:Kencana.
- Ali, Zainuddin. 2014. Metode Penelitian Hukum.Jakarta:Sinar Grafika
- Andri Harijanto, & Merryono. 2013. Kapita Selecta Hukum Adat, Bengkulu: Kombis FH Unib Press.
- Asikin, Zainal dan Amiruddin. 2016. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta : Kencana.
- Efendi, J. dan Johnny Ibrahim. (2018). Metode Penelitian Hukum. Depok: Prenamedia Group.
- Fernando M. Manullang. 2013. Menggapai Hukum Berkeadilan (Tinjauan Hukum Kodrat dan Antinomi Nilai. Jakarta: Buku Kompas.
- Harsono. 2013. Hukum Agraria Indonesia: Sejarah Pembentukan Undang-Undang Pokok Agraria, Isi dan Pelaksanaanya. Universitas Tri Sakti.
- Hartanto, J A. 2022. Panduan Lengkap Hukum Praktis Kepemilikan Tanah. Yogyakarta: Laksbang Justitia.
- Hikmawati, F. 2020. Metodologi Penelitian. Depok: PT Raja Grafindo.
- H.M. Arba. 2015. Hukum agraria Indonesia. Jakarta : Sinar Grafika.
- Ishaq. 2017. Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi, Tesis, Serta Disertasi. Bandung : Alfabeta.
- Ismail, Mahli. 2013. Fikih Hak Milik Atas Tanah Negara. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara.
- Isnaini, & Lubis. 2022. Hukum Agraria Kajian Komprehensif. Medan : Pustaka Prima.
- Karso, Junaedi. 2022. Urgensi Kepemilikan Hak Tanah Timbul di Patimban dalam Perspektif Undang-Undang Dasar 1945 Dan Undang-Undang Pokok Agraria Nomor 5 Tahun 1960. Purbalingga : Eureka Media Aksara.
- Marzuki, P. M. 2017. Penelitian Hukum: Edisi Revisi. Rawamangun: Kencana

- Muhammad, Abdulkadir. 2014. Hukum Perdata Indonesia. cet.5. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Muwahid. 2016. Pokok-pokok Hukum Agraria di Indonesia. Surabaya: UIN Sinan Ampel Press.
- ND, Fajar M., dan Yulianto Achmad. 2010. Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Hukum Empiris. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Samun, Ismaya. 2013. Pengantar Hukum Agraria. Yogyakarta: Graha Ilmu
- Samosir, Djamanat. 2013. Hukum adat Indonesia: eksistensi dalam dinamika perkembangan hukum di Indonesia. Bandung: Nuansa Aulia.
- Sihombing, Romi. 2022. Cacat Administrasi Pembatalan Sertifikat Tanah Oleh BPN Tanpa Putusan Pengadilan. Jakarta: Kencana.
- Syarif, Elsa. 2014. Menuntaskan Sengketa Tanah Melalui Pengadilan Khusus Pertanahan. Jakarta: Gramedia
- Syaukani, dkk. 2013. Otonomi Daerah dalam Negara kesatuan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, cet III.
- Soerodjo, Irawan. 2014. Hukum Pertanahan, Hak Mengelola Atas Tanag (HPL) Eksistensi, Pengaturan dan Praktik. Yogyakarta: LaksBang Mediatama.
- Urip Santoso.,2015, Hukum Agrari Kajian Komprehensif, Jakarta, Prenadamedia Group.

Artikel dalam Jurnal

- Adinegoro, K. R. R. (2023). Analisis Yuridis Pemberian Hak Atas Tanah di Sempadan Pantai. *Jurnal Pertanahan*, 13(2).
- Amir, L., Noviades, D. S., & Nuriyatman, E (2021). Hak Mengelola Tanah Timbul Di Pinggiran Sungai Rights To Manage Land Arising In The River River. *Jurnal Penelitian Hukum de Jure*.
- Arisaputra, M. I. (2015). Penguasaan Tanah Pantai dan Wilayah Pesisir di Indonesia. *Perspektif Hukum*, 27-44.
- Azzahra, N., Yamin, M., & Zaidar, Z. (2023). Tinjauan Yuridis Kedudukan Hukum Tanah Timbul (Studi Di Kecamatan Dewantara Kabupaten Aceh Utara). *Buletin Konstitusi*, 4(1).
- Condro, H. E., Budi, S. T., & Puji, H. (2018). Perubahan garis pantai dan pengaruhnya terhadap status kepemilikan dan penguasaan tanah timbul di muara Sungai Wulan tahun 1986-2016. *Geo-Image*, 7(2), 131-140.
- Eliza Rafida Hanum, "Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo", *Jurnal Politik Indonesia*, Vol. 2, No. 1, 2017, hlm. 136.

- Hanum, E. (2017). Dinamika Konflik Tanah Timbul di Pulau Sarinah Kabupaten Sidoarjo. *Jurnal Politik Indonesia*, 2(1), 135-142.
- Hadisiswati, Indri. (2014). Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum Hak Atas Tanah, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 2, Nomor 1, 2014, hal. 121.
- Hidayat, A. T. (2021). Tinjauan Empiris Keragaan Penatagunaan Tanah Timbul di Desa Singaraja Kabupaten Indramayu Provinsi Jawa Barat. In Seminar Nasional Hari Air Sedunia (Vol. 3, No. 1, pp. 150-155).
- Hidayat, R. W. D. A. (2009). Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) Sebagai Dasar Untuk Memperoleh Hak Milik Atas Tanah. *Jurnal Pandecta*, 3(1).
- Ilham, I., & Djauhari, D. (2017). Permohonan Hak Milik Yang Berasal Dari Tanah Negara Di Kantor Pertanahan Kota Semarang. *Jurnal Akta*, 4(3).
- Korto, J., Jasin, M. I., & Mamoto, J. D. (2015). Analisis pasang surut di pantauan (desa iyok) boltim dengan metode admiralty. *Jurnal Sipil Statik*, 3(6).
- Limbong, D. (2017). Tanah Negara, Tanah Terlantar Dan Penertibannya. *Jurnal Mercatoria*, 10(1), 1-9.
- Mahesa, K. H., Setianto, M. J., & Dantes, K. F. (2023). Perlindungan Hukum Dalam Jual Beli Tanah Di Bawah Tangan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria. *Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis*, 3(4), 115-124.
- Marsella, M. (2015). Perspektif Penanganan Sengketa Pertanahan Di Badan Pertanahan Nasional. *Jurnal Ilmiah Penegakan Hukum*, 2(2), 101-107.
- Remaja, N. G. (2014). Makna hukum dan kepastian hukum. *Kertha Widya*, 2(1).
- Rosad, A. M. (2019). Implementasi pendidikan karakter melalui manajemen sekolah. *Tarbawi: Jurnal Keilmuan Manajemen Pendidikan*, 5(02), 173-190.
- Sitohang, E., & Siambaton, T. (2021). Peran badan pertanahan nasional dalam penyelesaian sengketa kepemilikan tanah. *Jurnal Hukum PATIK*, 10(1), 61-68.
- Oe, M. D. (2015). Tugas dan fungsi badan pertanahan nasional dalam pendaftaran tanah. *Pranata Hukum*, 10(1).
- Ompusunggu, S. M., Sarmita, I. M., & Wesnawa, I. G. A. (2023). Persepsi Masyarakat terhadap Pemanfaatan Sempadan Pantai untuk Kegiatan Ekonomi dan Dampaknya bagi Lingkungan Pantai (Studi Kasus: Pantai Penimbangan). *Jurnal Pendidikan Geografi Undiksha*, 11(1), 18-23.
- Prayogo, R. T. (2016). Penerapan asas kepastian hukum dalam peraturan mahkamah agung nomor 1 tahun 2011 tentang hak uji materiil dan dalam peraturan mahkamah konstitusi nomor 06/PMK/2005 tentang pedoman beracara dalam pengujian undang-undang. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 13(2), 191-201.

- Pulungan, R. (2013). Status Penguasaan Tanah Timbul (Aanslibbing) di Kecamatan Rengat Kabupaten Indragiri Hulu. *Premise Law Journal*, 1(2), 139-57.
- Rahmawati, R., & Marpaung, D. S. H. (2023). Perlindungan Hukum Atas Status Kepemilikan dan Penguasaan Tanah Timbul di Desa Muarabaru Kabupaten Karawang. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan*, 9(10), 500-511.
- Sudiro, A. A., & Putra, A. P. (2023). Kepastian Hukum Terhadap Hak Atas Pendaftaran Tanah Dan Hak Kepemilikan Atas Tanah Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, 5(1), 36-46.
- Sugianto, B. (2017). Pendaftaran tanah adat untuk mendapat kepastian hukum di Kabupaten Kepahiang. *Jurnal Panorama Hukum*, 2(2), 131-148.
- Wijaya, K. (2013). Perspektif Hukum Agraria Pada Masyarakat Indonesia. *Jurnal Hukum Unsrat*, 1(5), 38-54.
- Wales, S. V. (2022). Proses Dalam Pensertifikatan Tanah Negara Dalam Perspektif Pendaftaran Tanah. *Lex Administratum*, 10(1).
- Wowor, F. (2014). Fungsi badan pertanahan nasional terhadap penyelesaian sengketa tanah. *Lex Privatum*, 2(2).
- Zulaikha, R. A., Sudaryatmi, S., & Prasetyo, A. B. (2016). Penentuan hak dan pemanfaatan tanah Timbul (Aanslibbing) di Desa Cimrutu, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap. *Diponegoro Law Journal*, 5(2), 1-17.

Karya Tulis Ilmiah

- Ana, E. S. 2022. Problematika Penetapan Hak Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) Prespektif Maslah (Studi Kasus Konflik Antara Perum Perhutani Dengan Masyarakat di Desa Cimrutu, Patimuan, Cilacap). Skripsi Universitas Islam Negeri Prof Kai Haji Saifuddin Zuhri.
- Utrujjah, Masyithah. 2016. Status Hukum Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul (Aanslibbing) oleh Masyarakat dan Pemerintah Kota Makassar Kelurahan Barombong. Skripsi Universitas Muhammadiyah Mataram.
- Indasari, Yunisa. 2014. Analisis Yuridis Hak Penguasaan Atas Tanah Timbul Berdasarkan Undang – Undang Pokok Agraria Dan Rencana Tata Ruang Wilayah Di Kecamatan Teluk Segara Kota Bengkulu. Skripsi Universitas Bengkulu.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 Tentang Peraturan Dasar pokok-pokok Agraria (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043).
- Undang-Undang No. 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 16 tahun 2004 Tentang Penatagunaan Tanah (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385).

Peraturan Pemerintah Nomor Republik Indonesia No. 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional,

Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 51 Tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai.

Peraturan Menteri Agraria Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penataan Tanah Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.

Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: P.6/Menhut-II/2010 Tentang Pedoman, Kriteria Dan Standar Pemanfaatan Hutan Di Wilayah Tertentu Pada Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung Dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi.

Peraturan Menteri Negara Agraria/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian Dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara Dan Hak Pengelolaan.

Surat Edaran Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 410-1293 Tentang Penertiban Status Tanah Timbul dan Tanah Reklamasi.

